

E. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi	27
F. Organisasi Perangkat Daerah	28
G. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000	29
H. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000	30
I. Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah	31
J. Dana Perimbangan	33
BAB III PEMERINTAHAN DAERAH	36
A. Pemerintahan Daerah	36
B. Prinsip Negara Kesatuan	37
C. Urusan Pemerintahan	44
BAB IV RESTRUKTURISASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH	48
A. Pendahuluan	48
B. Landasan Konsepsional	49
C. Restrukturisasi Pemerintahan Daerah	52
D. Eksistensi dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	53
E. Pembangunan Daerah	56
F. Penutup	57
BAB V PERSPEKTIF PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA	59
A. Latar Belakang	59
B. Ruang Lingkup	60

C. Permasalahan	62
D. Tantangan Masa Depan	62
E. Prinsip Negara Kesatuan	64
F. Aparatur Negara	66
G. Hubungan Kelembagaan Negara	68
H. Pembangunan Aparatur Negara	70
BAB VI PENGGALIAN SUMBER DAYA ALAM, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	73
A. Sumber Keuangan Daerah	73
B. Isu Pelaksanaan Otonomi Daerah	75
C. Potensi Sumber Daya Alam	77
D. Pendapatan Asli Daerah	78
E. Sumber Daya Manusia	78
BAB VII PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DESA	83
A. Latar Belakang	83
B. Peranan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	86
C. Pajak dan Retribusi Daerah	90
BAB VIII PERANAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DESA	92
A. Peranan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa	92

XIV	Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia	
	B. Aparatur Pemerintahan Desa	96
	C. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	98
BAB IX	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	102
	A. Latar Belakang	102
	B. Organisasi Perangkat Daerah	103
	C. Ruang Lingkup	103
	D. Pokok-pokok Pikiran	104
	E. Implementasi	105
	F. Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	108
	G. Penataan Organisasi Perangkat Provinsi Sumatra Selatan	112
	H. Penutup	113
BAB X	PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS DEMOKRASI	114
	A. Pendahuluan	114
	B. Partai Politik dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	115
	C. Partai Politik dan Pilkada Langsung Secara Demokratis	117
	1. Peran Partai Politik	117
	2. Pilkada Langsung Secara Demokratis	120
	3. Landasan Yuridis	121
	4. Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Pilkada Langsung	122
	5. Wewenang DPRD dalam Pilkada Langsung	123
	6. Peranan KPU/KPUD	125

	Daftar Isi	XV
	7. Pemimpin Panutan dan Pelayanan Masyarakat	126
	D. Kesimpulan	127
	BAGIAN KEDUA	
BAB I	PENDAHULUAN	131
	A. Penjelasan Umum	131
	1. Dasar Pemikiran	131
	2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus	134
	3. Pembagian Urusan Pemerintahan	136
	4. Pemerintah Daerah	140
	5. Perangkat Daerah	142
	6. Keuangan Daerah	143
	7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	144
	8. Kepegawaian Daerah	145
	9. Pembinaan dan Pengawasan	147
	10. Desa	148
	B. Ketentuan Umum	150
	C. Prinsip Negara Kesatuan dan Pembagian Daerah	153
	D. Pemerintah Daerah	155
BAB II	PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS	156
	A. Bagian Kesatu : Pembentukan Daerah	156
	B. Bagian Kedua : Kawasan Khusus	159

XVI	Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia	
BAB III	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN	161
	A. Urusan Pemerintahan	161
	B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	164
	C. Hubungan dalam Bidang-bidang	167
BAB IV	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	172
	A. Bagian Kesatu: Penyelenggaraan Pemerintahan	172
	B. Bagian Kedua: Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	172
	C. Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Daerah	173
	D. Bagian Keempat: Pemerintah Daerah	175
	E. Bagian Kelima: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	188
	F. Bagian Keenam: Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD	198
	G. Bagian Ketujuh: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD	199
	H. Bagian Kedelapan: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200
	I. Bagian Kesembilan: Perangkat Daerah	235
BAB V	KEPEGAWAIAN DAERAH	241
BAB VI	PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	244
	A. Peraturan Daerah	244
	B. Peraturan Kepala Daerah	248
BAB VII	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250

	Daftar Isi	XVII
BAB VIII	KEUANGAN DAERAH	253
	Paragraf Kesatu : Umum	253
	Paragraf Kedua : Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	254
	Paragraf Ketiga : Surplus dan Defisit APBD	261
	Paragraf Keempat : Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	261
	Paragraf Kelima : BUMD	262
	Paragraf Keenam : Pengelolaan Barang Daerah	262
	Paragraf Ketujuh : APBD	263
	Paragraf Kedelapan : Perubahan APBD	264
	Paragraf Kesembilan: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	264
	Paragraf Kesepuluh : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD	265
	Paragraf Kesebelas : Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah	269
BAB IX	KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN	272
BAB X	KAWASAN KOTA	274
BAB XI	DESA	276
	A. Bagian Pertama : Umum	276
	B. Bagian Kedua : Pemerintah Desa	277

	C. Bagian Ketiga : Badan Permusyawaratan Desa	279
	D. Bagian Keempat : Lembaga Lain	279
	E. Bagian Kelima : Keuangan Desa	280
	F. Bagian Keenam : Kerja Sama Desa	281
BAB XII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	283
BAB XIII	PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH	286
BAB XIV	KETENTUAN LAIN-LAIN	288
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN	293
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP	295
	DAFTAR PUSTAKA	297
	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG Pemerintahan Daerah	305
BAB IX	KERJA SAMA DAN BERSAMA-SAMA PERSELISIHAN	199
BAB X	KAWASAN KOTA	199
BAB XI	DESA	200
	A. Peraturan Desa	235
	B. Peraturan Kepala Daerah	235
BAB XII	PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KAWASAN KOTA	235
	A. Peraturan Daerah	235
	B. Peraturan Kepala Daerah	235
BAB XIII	PERANGKAP	250